

Respon Masyarakat terhadap Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pendangkalan Muara Aik Katung Jelitik

Fitri Handayani¹, Cindy Melany Sadin¹, Ningtyas Ganes Padmarani¹, Herza¹

¹ Program Studi Sosiologi, Universitas Bangka Belitung

herzazul@ubb.ac.id

Untuk mengutip artikel ini:

Handayani, F., Sadin, C. M., Padmarani, N. G., & Herza. (2024). Respon Masyarakat terhadap Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pendangkalan Muara Aik Katung Jelitik. *Jurnal Atma Sosiologika*, Vol. 1(2), 177-198.

ABSTRAK

Muara Aik Kantung Jelitik Sungailiat adalah salah satu muara yang mejadi sumber penghasilan masyarakat nelayan di Sungailiat, Kabupaten Bangka. Muara tersebut menjadi jalur penghubung antara pangkalan sandar kapal dan tepian laut yang menjadi tempat bagi para nelayan mencari hasil tangkapan laut. Namun, ada berbagai masalah di muara tersebut. Pertama, terjadi pendangkalan berkepanjangan sejak dahulu dan belum ditemukan solusi permanen agar kondisi muara dapat normal sehingga masyarakat nelayan dapat melintasi muara ke pangkalan sandar. Kedua, adanya realitas sosial yang dinamis berhubungan dengan kepentingan pemerintah, masyarakat nelayan dan PT. Pulomas. Penelitian ini berfokus pada upaya mengeksplorasi realitas sosial tersebut melalui studi lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif studi kasus instrumental. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Penelitian ini menemukan bahwa respons masyarakat terhadap upaya penanganan masalah ini sangat bervariasi. Respons positif diberikan kepada PT. Pulomas yang konsisten melakukan pengerukan. Sebaliknya, respons negatif lebih diarahkan kepada pemerintah yang dianggap gagal menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam memberikan alternatif solusi. Masyarakat nelayan sangat bergantung dengan proses pengerukan yang dilakukan oleh PT. Pulomas agar mereka dapat bebas melintas untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai nelayan. Kesimpulannya, apabila pemerintah ataupun perusahaan semata-mata berorientasi pada keuntungan bisnis dari proses menanggapi realitas di Muara Aik Kantung, tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat, maka secara sosiologis besar sekali kemungkinan menyebabkan kepercayaan masyarakat menjadi menurun di mana masyarakat merasa bahwa kepentingan sosial mereka dijadikan alat untuk menjalankan kepentingan bisnis.

Kata Kunci: Bangka; Muara; Nelayan; Pemerintah; PT. Pulomas

ABSTRACT

Muara Aik Kantung Jelitik Sungailiat is one of the estuaries that is a source of income for the fishing community in Sungailiat, Bangka Regency. The estuary is a connecting point between the ship berthing base and the mouth of the sea where fishermen look for sea catches. However, there are various problems in the estuary. First, there has been a prolonged siltation since a long time ago and no permanent solution has been found so that the condition of the estuary can be normalized, and the fishing community can cross the estuary to the berthing base. Second, there is a dynamic social reality related to the interests of the government, the fishing community and PT Pulomas. This research focuses on exploring these social realities through field studies. This research is a qualitative study with an instrumental case study method to obtain in-depth data and analysis of the topics studied by collecting data from interviews and direct observation. This research found that the community's response to efforts to handle this problem varied greatly. Positive responses were given to PT Pulomas for consistently dredging. In contrast, negative responses were directed more towards the government, which was considered to have failed to carry out its roles and responsibilities in providing alternative solutions. The fishing community is very dependent on the dredging process carried out by PT Pulomas so that they can freely pass through to fulfill their needs as fishermen. The inability of the local government has left the community disappointed. In conclusion, if the government or company is solely oriented towards business profits from the process of responding to the reality in Muara Aik Kantung, without paying attention to the needs of the community, then sociologically it is very likely to cause community trust to decrease where people feel that their social interests are used as a tool to carry out business interests.

Keywords: Bangka; Estuary; Fisherman; Government; PT. Pulomas

PENDAHULUAN

Sebagai negara *archipelago* yang digugus oleh banyak pulau, Indonesia memiliki wilayah kelautan dan sumber daya perairan yang kaya dan melimpah. Berdasarkan data dari Sidako KKHL (Kementrian Kelautan dan Perikanan, SIKADO, 2018) bahwa pada tahun 2018, luas perairan laut Indonesia mencapai 6.400.000 km². Salah satu wilayah dengan perairan yang luas dan cukup signifikan adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas laut mencapai 65.301 kilometer persegi atau 79.90% wilayahnya dikelilingi oleh wilayah lautan. Kondisi ini menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi yang memiliki potensi besar dalam memperoleh sumber daya beragam jenis ekosistem yang ada di lautan seperti perikanan dan aneka macam hasil tangkapan laut lainnya.

Keberagaman profesi masyarakat Bangka Belitung dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk bertahan hidup menuntut upaya ekstra dari berbagai pihak dalam menjaga dan memberikan perhatian lebih pada alam agar pemanfaatan sumber daya alam terealisasi secara

arif. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga sumber daya alam, karena pada prinsipnya sumber daya alam adalah jenis sumber daya yang memiliki kemungkinan untuk habis dan tidak dapat terbarukan apabila telah terjadi kerusakan ekologi. Terutama di lautan, sifat alam di lintas wilayah perairan memiliki batas wilayah dan kewenangan kepemilikan yang harus dijaga dan dipatuhi, apabila dilanggar dan sumber daya yang terkandung dalam wilayah tersebut di eksploitasi berlebihan maka sangat potensial memunculkan konflik lingkungan dan konflik sosial.

Salah satu konflik yang terjadi adalah konflik antara nelayan desa Teluk Limau dengan PT Timah dan Pemerintah Daerah Bangka Barat yang mengizinkan penambangan timah oleh kapal isap yang menimbulkan konflik sosial akibat eksploitasi timah di laut yang terjadi pada tahun 2011. Bahkan, warga melakukan anarkisme seperti merusak dan membakar alat berat milik PT Timah sebagai protes keras atas ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat nelayan. Keberadaan penambang Timah Inkonvensional (TI) turut memperparah kondisi, sebab aktivitas penambangan di laut merusak ekosistem laut. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan menurun, biaya operasional membengkak dan merenggut sumber pencaharian. Lagi-lagi, akar masalahnya adalah dari keegoisan penambang TI dalam mengeruk sumber timah dan berakhir pada menurunnya produktivitas nelayan akibat hasil tangkapannya terganggu oleh aktivitas penambangan (Sulaiman, 2015).

Di Bangka Belitung sendiri memang telah mengalami banyak sekali konflik akibat eksploitasi seperti yang disinggung di atas. Selain itu, ada juga konflik lain yang permasalahannya masih berlangsung hingga hari ini, konflik tersebut ialah konflik yang terjadi di Perairan Muara Aik Katung Jelitik, Sungailiat, Kabupaten Bangka. Berdasarkan temuan dan observasi diketahui bahwa konflik di Muara Aik Katung Jelitik telah berlangsung cukup lama. Persoalan yang dialami oleh masyarakat di sekitar muara adalah kondisi di sekitar tanah muara yang rentan luruh dan menyebabkan mulut laut dangkal sehingga menutup akses lajur kapal-kapal nelayan. Telah lama diketahui bahwa permasalahan sumber daya ini dapat menyebabkan permasalahan kompleks.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh (Sulaiman, 2015) pemicu utama terjadinya konflik sosial adalah politik dan kekuasaan terkait struktur dan kekuasaan hierarkis sehingga tercipta konflik struktural. Ketidakseimbangan kekuasaan pada dimensi vertikal (pihak berkuasa seperti pemerintah daerah dengan kebijakan yang dikeluarkannya menguntungkan perusahaan) dan dimensi horizontal (pihak setara seperti konflik antara komunitas nelayan dan penambang TI dalam memperebutkan akses terhadap sumber daya ekonomi) yang saling

mempengaruhi dan menjadi pemicu timbulnya konflik struktural. Keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan menimbulkan kepentingan politik bagi berbagai pihak, kepentingan politik dapat mendorong terjadinya kepentingan bisnis karena kebijakan yang dikeluarkan berpotensi dalam mendukung dan menguntungkan perusahaan tertentu tanpa memperhitungkan dampak buruk terhadap kesejahteraan rakyat, membuat perusahaan bebas dalam mengeksploitasi sumber daya ekonomi di laut tanpa hambatan karena adanya jaminan regulasi. Bentuk timbal baliknya adalah, pihak perusahaan akan memberi imbalan dari aktivitas penambangan dengan jumlah persentase yang telah disepakati guna memperkuat dan melanggengkan kekuasaan mitra yang telah membantu perusahaan dalam menjalankan aktivitas penambangan atas izin dari unsur pemerintah.

Alur muara sebagai penghubung antara hilir sungai dengan laut turut menjadi bagian yang sangat vital bagi sumber daya perikanan dan kelautan. Hal ini karena alur muara menjadi akses para nelayan untuk pergi melaut. Terganggunya area muara tentunya akan menghambat nelayan dalam merealisasikan aktivitas mereka. Berdasarkan hasil wawancaranya, diketahui bahwa pendangkalan yang terjadi di Muara Aik Kantung ini disebabkan oleh aktivitas penambangan timah di bagian muara dan laut yang dilakukan secara masif dari puluhan tahun yang lalu hingga saat ini. Akibatnya, endapan pasir dan lumpur menjadi terbawa oleh gelombang dan akhirnya menggunung. Hal ini menyebabkan lalu lintas kapal menjadi terhambat karena kapal nelayan tidak dapat keluar dan masuk, hanya muara tersebutlah yang menjadi jalur alternatif yang menghubungkan perahu dengan mulut laut dan juga pelabuhan yang ada di muara. Menandakan bahwa masyarakat nelayan sangat bergantung pada Muara Aik Kantung karena mampu memberikan akses jalan bagi para nelayan untuk melaut.

Ketergantungan ini akan menyulitkan para nelayan apabila kondisi mulut muara menjadi dangkal karena runtuhnya pasir yang mengendap, membuat nelayan sulit untuk pergi berlayar dan terpaksa menunda kegiatan melaut. Selain itu, pendangkalan ini pun menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat nelayan terhadap kandas dan rusaknya kapal-kapal saat melewati perairan yang dangkal. Apabila kekhawatiran tersebut terjadi, maka akan menimbulkan kerugian besar yang harus ditanggung oleh masyarakat nelayan.

Beruntung, kekhawatiran masyarakat berangsur mereda saat diberlakukannya izin pengerukan dan pendalaman muara yang dilakukan oleh PT. Pulomas Sentosa. Berdasarkan observasi langsung di lapangan, tampak alat konstruksi besar dioperasikan setiap hari untuk mengeruk pasir dan membuka jalan bagi para nelayan untuk melintas. Tetapi, di tengah situasi lenggang yang ada, ternyata sejak tahun 2020 terjadi desakan gejolak kepentingan antara pihak

pemerintah dan pihak korporasi dalam menimbang kepemilikan pengelolaan muara Aik Kantung Jelitik yang sama-sama ingin menjalankan kepentingan sosialnya dan tentu dibarengi oleh kepentingan bisnis. Gejala ini memicu konflik antara pihak PT Pulomas Sentosa yang saat ini mengantongi izin usaha dengan pihak Pemerintah Daerah, khususnya Gubernur Bangka Belitung kala itu, Erzaldi Rosman Djohan (Radarbahtera, 2021). Ketegangan konflik ini membuat permasalahan di muara Aik Kantung menjadi semakin kompleks.

Konflik antara PT. Pulomas Sentosa dengan Pihak Pemerintah berawal dari Gubernur Bangka Belitung yang telah melakukan pencabutan izin PT Pulomas Sentosa. Pencabutan izin ini dilakukan karena pemerintah daerah merasa pekerjaan pengerukan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun oleh PT. Pulomas tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat nelayan, terutama pada proses pendangkalan yang tidak berubah alur posedurnya. PT Pulomas hanya memindahkan luruhan pasir dan membuka jalan aliran sungai agar tidak terjadi pendangkalan dan nelayan dapat melintasi jalur penghubung pelabuhan dan mulut sungai. Apabila endapan pasir tersebut luruh kembali, maka PT. Pulomas akan melakukan hal yang sama setiap harinya. Selain itu, pemerintah daerah merasa bahwa PT Pulomas Sentosa tidak memenuhi harapan pemerintah yang menginginkan agar mereka menggunakan teknologi yang canggih untuk melakukan pekerjaan pengerukan ini (Redaksi CMM, 2021).

Keputusan pencabutan izin pun memicu banyak sekali pro dan kontra di kalangan masyarakat nelayan. Bahkan, saat PT. Pulomas dicabut izin aktivitasnya, muncul dugaan dan prasangka dari beberapa pihak yang mengatakan bahwa konflik antar PT. Pulomas dan Pemerintah Daerah memiliki unsur kepentingan bisnis. Keduanya sama-sama menjadikan kepentingan sosial bagi masyarakat nelayan dengan membuka jalur muara sehingga keinginan dan harapan masyarakat berlayar kembali dapat dirasakan oleh nelayan. Setelah mendapat simpati dan hati rakyat, gerakan yang dilakukan berikutnya adalah menjalankan kepentingan bisnisnya dengan memanfaatkan potensi yang ada di Muara Aik Kantung Jelitik.

Permasalahan ini menjadi sangat penting untuk dikembangkan dan dianalisis lebih dalam. Jika permasalahan pendangkalan dan penyumbatan alur muara ini tetap dibiarkan, maka gunung sedimen akan semakin massif terjadi dan pengelolaan terhadap lajur muara tidak menemukan titik solusi yang signifikan, karena antara pihak pemerintah yang berwenang atas segala jenis regulasi dan juga PT. Pulomas yang mendapatkan izin usaha dan aktivitas dapat mengancam keberlanjutan mata pencaharian masyarakat nelayan di sana.

Dampak langsungnya dari masalah ini adalah terjadinya penurunan kesejahteraan masyarakat nelayan yang menggantungkan perekonomiannya dengan melaut melalui jalur

muara Aik Kantung ini. Selain itu, jika pemerintah dan PT. Pulomas terus menunjukkan ketidakmampuannya untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dan kepentingan sosial, maka dapat menimbulkan gejala atau konflik sosial yang bereskalasi secara cepat dan signifikan. Berdasarkan persoalan yang sudah dipaparkan di atas maka fokus dari penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana variasi respons masyarakat di sekitar Muara Aik Katung mengenai upaya pemerintah mengatasi pendangkalan Muara Aik Katung.

KERANGKA KONSEP/TEORI

Menurut Blau dan Meyer (dalam Kadir, 2015) bahwa tipe ideal yang digagas oleh Max Weber adalah kerangka teoritis yang dapat membantu untuk menganalisis dan menjelaskan elemen-elemen yang ada dari fenomena sosial atau organisasi. Tipe ideal ini menjadi tolak ukur untuk mempertimbangkan seberapa sesuai atau menyimpang suatu fenomena sosial yang terjadi terhadap tipe ideal. Terkait hal ini, birokrasi, sebagai salah satu bentuk tipe ideal, adalah organisasi yang diakui legitimasi (kewenangannya) dan yang paling efisien serta rasional untuk mengontrol atau mengendalikan manusia secara tegas dengan aturan yang ada. Hal ini karena birokrasi berlandaskan otoritas legal-rasional yang memiliki 5 prinsip dasar, di antaranya:

1. Standarisasi dan formalisasi.

Tompkins (dalam Kadir, 2015) berpendapat bahwa Weber lebih berfokus pada standarisasi proses kerja dan keterampilan pekerja sebagai cara rasional untuk mengatur aktivitas kerja. Formalisasi artinya sejauh mana pekerjaan yang ada di organisasi diatur oleh peraturan atau prosedur.

2. Pembagian kerja dan spesialisasi.

Hummel (dalam Kadir, 2015) menjelaskan bahwa pembagian kerja dalam birokrasi lebih terstruktur dan jelas daripada sistem patrimonial. Sementara Simon (dalam Kadir, 2015) mengatakan bahwa jika tugas dibagikan sesuai dengan keahlian pejabat tersebut maka pekerjaan dapat meningkatkan efisiensi administratif dan perekonomian. Dalam hal ini, pembagian kerja dapat dilakukan dengan kombinasi fungsi dan spesialisasi fungsi. Mengombinasikan fungsi membuat manajer bisa menangani banyak fungsi manajerial sekaligus. Sedangkan spesialisasi fungsi membuat manajer hanya mengerjakan satu fungsi/tugas sehingga sesuatu bisa diselesaikan jika adanya kerja sama yang baik oleh sekelompok orang.

3. Hirarki otoritas.

Anggota organisasi tunduk terhadap otoritas karena kapasitas atau tugas dan tanggung jawab yang dimiliki pejabat. Dalam hal ini, ketundukan seseorang mengikuti hukum dan aturan yang telah ditetapkan, bukan karena individu lain. Setiap anggota memiliki tugasnya masing-masing yang telah dibagi dengan jelas. Lebih lanjut terdapat empat kewenangan minimum yang dimiliki pejabat birokratik, yaitu: (1) *Veto selection* (V) yang menolak pelamar yang tidak memenuhi standar keahlian yang ada. (2) *Assign task* (A) yang memberi perintah. (3) *Recognise, review and reward work performance differentially* (R3) yang memberikan penghargaan atau apresiasi. (4) *Initiate removal from role* (I) yang membuat keputusan memberhentikan. Selain itu, terdapat juga kewenangan mengeluarkan uang, mengalokasikan sumber daya fisik, menandatangani perjanjian, dan memilih calon untuk menjadi anggota organisasi sebagai kewenangan tambahan (Kadir, 2015).

4. Profesionalisasi.

Menurut Max Weber (dalam Kadir, 2015) pengetahuan teknis menjadi penting karena perkembangan teknologi modern dan metode bisnis dalam produksi barang. Pengetahuan merupakan sumber utama superioritas administrasi birokratis digunakan sebagai basis untuk mengontrol dan menjadikan birokrasi bersifat rasional. Oleh karena itu, untuk mendapatkan birokrat yang profesional maka harus diseleksi berdasar kualifikasi teknis tanpa campur tangan politik. Hasilnya individu yang mempunyai pelatihan teknis yang memadai yang akan menduduki posisi administratif dan diangkat. Pejabat diberikan gaji tetap dengan besaran sesuai dengan kedudukannya di hierarki birokrasi dan mayoritas mendapatkan hak pensiun.

5. Dokumentasi tertulis.

Menurut Max Weber (dalam Kadir, 2015) setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan administratif yang dilakukan oleh organisasi birokratik harus dirumuskan serta didokumentasikan secara tertulis yang mencakup pembahasan awal dan proposal, keputusan akhir serta semua perintah dan aturan. Lebih lanjut, Tompkins (dalam Kadir, 2015) menjelaskan bahwa dokumentasi tertulis ini penting untuk memastikan kelancaran operasional organisasi, akuntabilitas dan evaluasi, serta melindungi semua pejabat dalam hierarki otoritas.

Kekuasaan otoritas legal-rasional dipercaya dan diterima masyarakat, di mana aturan dan kebijakan yang ada dibuat berdasarkan pada aturan formal yang jelas (legalitas) serta dapat dianalisis dengan ilmiah karena dibuat berdasarkan kebutuhan nyata dilapangan sehingga objektif dan tepat sasaran (Kadir, 2015).

Tipe ideal yang dikemukakan oleh Max Weber sangat relevan untuk mengulik permasalahan pendangkalan muara Air Katung Jelitik yang disebabkan sedimentasi yang terus menggunung dan meluruh menyulitkan nelayan untuk mencari nafkah. Permasalahan ini juga menimbulkan respons yang berbeda-beda di kalangan masyarakat nelayan terhadap upaya pengerukan yang dilakukan oleh PT. Pulomas hingga akhirnya izin berusaha PT. Pulomas yang sempat dicabut oleh gubernur. Dampak pencabutan izin tersebut adalah pendangkalan alur muara semakin parah karena pemerintah daerah yang mementingkan kepentingan bisnisnya yang tidak kunjung memberikan solusi berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hingga saat ini muara bertahan dengan pengerukan menggunakan ekskavator oleh PT. Pulomas. Di mana pemerintah daerah sebagai birokrasi yang rasional tidak mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan menyimpang dari tipe ideal dalam memprioritaskan kepentingan sosial masyarakat terutama nelayan. Akibat ketidakmampuan ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menghilang dan memunculkan ketegangan antara pemerintah dan nelayan. Respon masyarakat terhadap pemerintah pun menjadi buruk dan lebih mempercayai PT. Pulomas yang dipandang mementingkan kepentingan sosial nelayan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus yang sifatnya instrumental. Studi kasus ditujukan guna memahami faktor penyebab serta dampak terhadap kasus yang diteliti (Prihatsanti & Hendriani, 2018). *Instrumental case* studi menjadikan objek penelitian sebagai kasus yang dapat diteliti secara mendalam sehingga dapat mengidentifikasi hubungan sosial, dan mengategorikan lingkup kasus yang dapat dijabarkan secara detail dengan memberikan sebuah gambaran spesifik terhadap kasus. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena memungkinkan untuk mendapatkan data dan analisis yang mendalam terkait topik yang dibahas. Sumber data primer diperoleh dari informan yang dapat menjelaskan masalah yang menjadi objek penelitian dengan baik sehingga menghasilkan fakta akurat di lapangan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari artikel berita di internet dan artikel jurnal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung di Muara Aik Kantung Jelitik, Sungailit.

Metode kualitatif penulis gunakan untuk menjawab usaha dan fenomena yang terjadi dalam situasi sosial secara luas dan mendalam (Sugiono, 2022). Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan berdasarkan aktivitas sosial, sikap, dan persepsi individu serta kelompok. Metode kualitatif mengeksplorasi informasi secara detail dan mendalam berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan menjabarkan alasan dan mekanisme terjadinya suatu fenomena (Suparyanto dan Rosad, 2020). Selain itu, peneliti juga melakukan kajian literatur dengan menganalisis artikel berita, artikel ilmiah dan/atau artikel jurnal untuk menemukan kebaharuan terkait topik penelitian dengan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti (Widiarsa, 2019).

Pada penelitian ini dilakukan beberapa tahapan dalam proses pengumpulan data. Pada 1 Mei 2024 dilakukan observasi lapangan di Muara Aik Kantung Jelitik di Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Observasi dilakukan untuk mengetahui lokasi secara pasti dan mencari tahu kebenaran terhadap kegiatan ekspor pasir laut yang tengah gencar diberitakan beberapa bulan yang lalu. Serta dilakukan wawancara untuk mendapatkan data dan informasi mendalam serta menggali dan mencari tahu permasalahan yang ada di sekitar muara. Informan pada penelitian ini adalah masyarakat sekitar muara, yakni di antaranya Bapak Timbul, salah satu pedagang di daerah Pelabuhan Muara yang hampir 10 (sepuluh) tahun menetap dan berdagang di sana serta ada salah satu warga nelayan yang tidak ingin diketahui namanya.

Namun, pada 11 Mei 2024 setelah dilakukan kembali wawancara pada salah satu Penanggungjawab Pangkalan Sandar Kapal Patroli Polisi Air Polda Kepulauan Babel Sungailiat, yakni Bang Acun dan Bapak Heri Irawan, penulis menemukan informasi baru, bahwa konflik sunyi tengah terjadi di sekitar Muara Aik Kantung, sehingga peneliti mengubah haluan rancangan dan strategi judul untuk beralih mengupas fenomena konflik yang terjadi berdasarkan keterangan para informan. Wawancara dilakukan melalui panduan pertanyaan sehingga diperoleh data dan informasi mengenai kondisi dan permasalahan yang terjadi saat ini.



Gambar 1. Kondisi Muara dan Aktivitas Pendalaman serta Penggalian agar Tidak Terjadi Pendangkalan sehingga Perahu dapat Melintas

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

TEMUAN & PEMBAHASAN

Muara Aik Katung Jelitik

Muara adalah wilayah pertemuan antara ujung badan sungai yang satu dengan ujung badan sungai lainnya. Muara dapat diartikan sebagai zona transisi antara beberapa ujung badan air bertemu dengan laut. Salah satu muara yang ada di wilayah Sungailiat, Kepulauan Bangka Belitung adalah Muara Aik Kantung. Sejak dahulu muara ini menjadi jalan utama untuk nelayan pergi melaut. Namun, kondisi muara Aik Kantung Jelitik saat ini masih dalam tahap yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, terutama pada daerah pendangkalan dan memiliki volume sedimentasi pasir mencapai 1.000.000 kubik.

“Penting diketahui bersama, bahwa Muara Aik Kantung tergolong muara yang unik karena memiliki 3 fase sudut aliran arus yang memengaruhi peluruhan pasir di sekitaran muara. Fase pertama, musim utara, arus air laut sangat besar. Fase kedua, musim tenggara, arus air laut sedang. Fase ketiga, air normal, arus laut sangat kecil seperti sungai. Ketika musim utara yang merupakan masa arus laut akan sangat besar dan menyebabkan gunungan sedimen yang sudah dikeruk menggunakan alat ekskavator akan terbawa arus lagi. Semua sedimen ini akan berkumpul di pusat muara Aik Kantung sehingga pendangkalan terjadi lagi dan lagi.” (Wawancara Acun, Mei 2024)

Pendangkalan alur muara menghambat perekonomian nelayan. Hal ini karena jika nelayan memaksakan melaut, kapal akan mengalami kerusakan dan bahkan harus mengeluarkan biaya operasional lebih. Namun, jika nelayan pasrah dan tidak melaut, kapal yang terbengkalai juga akan mengalami korosi dan rusak. Ini berimbas pada menurunnya



kesejahteraan masyarakat, berdasarkan hasil wawancara, terhentinya produktivitas masyarakat nelayan yang berhenti melaut karena pendangkalan alur muara turut mempengaruhi sektor ekonomi di sekitarnya, seperti warung di sekitar muara menjadi sepi karena nelayan yang biasanya menjadi pelanggan di warung mereka tidak lagi berkunjung. Pemerintah pun belum memiliki langkah pasti terkait keberlanjutan pembangunan jalur laut yang menghubungkan dermaga.

Hingga saat ini, operasional muara masih bergantung pada jalur sempit yang digunakan para nelayan untuk melintas dan melakukan aktivitas pelayaran dalam mencari hasil laut. Hal ini menandakan bahwa muara Aik Kantung Jelitik menjadi jantung utama mendukung profesi masyarakat di sekitar muara dalam akses pelayaran kapal-kapal nelayan dalam mempermudah akses nelayan untuk mencari hasil tangkapan di lautan sebagai sektor ekonomi pendukung yang paling utama bagi masyarakat di sekitar Muara Aik Kantung Jelitik yang berprofesi sebagai nelayan.

Pendangkalan Muara dan Upaya Pemerintah

Sebagai wilayah penghasil timah terbesar, aktivitas penambangan yang dilakukan oleh masyarakat baik legal ataupun ilegal masih terjadi hingga saat ini, khususnya di wilayah Bangka. Maraknya penggalian yang dilakukan secara masif dan berkelanjutan dari pengambilan ekstraksi sumber daya alam menimbulkan berbagai kerusakan yang semakin lama semakin terasa dampaknya, di antaranya suhu iklim menjadi meningkat, kerusakan hutan *mangrove*, kerusakan jalan dan jembatan akibat abrasi, dan berkurangnya jumlah tangkapan ikan karena ekosistem di hutan *mangrove* rusak.

Kajian yang dilakukan oleh Maulana (dalam Sabri, 2017) mengatakan bahwa sedimentasi yang terjadi di muara Sungai Jelitik terjadi karena aktivitas penambangan di daerah pedalaman dengan persentase sebesar 98%, dan 2% lainnya terjadi karena pengaruh arus dan gelombang yang membawa material sedimen. Sedimen pasir di Muara Aik Kantung muncul akibat kegiatan penambangan timah yang meningkat di Pulau Bangka. Adanya pemisahan antara padatan dan cairan dalam air yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan terjadinya erosi di daerah mulut perairan kemudian jumlahnya semakin masif dan menyebabkan sedimentasi pasir mengalir ke daerah hilir muara (Peteet & Nichols, 2020)

Terhitung sejak 2014, sedimen di muara Sungai Jelitik terus meningkat dan berimplikasi pada lalu lintas kapal dari mulut perairan dan pelabuhan perikanan nasional Sungailiat padat dan terhambat apabila kondisi laut tidak stabil dan terjadi pasang surut. Penanganan yang

dilakukan dalam mengatasi masalah sedimentasi dan tertutupnya jalan bagi perahu-perahu nelayan adalah dengan dilakukan pengerukan dan pelebaran alur sungai sehingga perahu-perahu nelayan dapat melintas keluar masuk menuju pelabuhan sehingga aktivitas pelayaran tidak terganggu hanya karena permasalahan jalur laut tertutup karena dangkalnya perairan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sedimen pasir selalu luruh dan menutupi jalur sehingga semakin membuat perairan menjadi dangkal. Pengerukan pun terus dilakukan dengan bantuan 2 (dua) ekskavator yang dimotori oleh PT. Pulomas Sentosa yang selalu beroperasi membuka jalan setiap harinya. Hadirnya ekskavator adalah bentuk perizinan pemerintah kota pada PT. Pulomas Sentosa dalam melakukan pengerukan dan pendalaman muara Aik Kantung Sungailiat setelah dua tahun lalu izin operasional PT. Pulomas diberhentikan.



Gambar 2. Spanduk PT. Pulomas Sentosa yang telah beroperasi dalam mengeruk dan melakukan pendalaman alur Muara Aik Katung Sungailiat

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

Hadirnya PT. Pulomas dalam melakukan aktivitas pengerukan dan pendalaman muara Aik Kantung Sungailiat bukan tanpa alasan, PT Pulomas mendapatkan izin melakukan aktivitas karena dinilai memberikan manfaat sosial yang tinggi dari masyarakat. Sebelumnya, PT. Pulomas telah memenangkan izin operasional sejak 6 tahun yang lalu, namun karena muncul pergolakan dan gejolak konflik antar PT. Pulomas dan Pemerintah, maka izin usaha operasional dalam melakukan pendangkalan diberhentikan sejak 2019 – 2021. Hal ini berimplikasi pada banyaknya gaduh-riuh keluhan masyarakat nelayan karena tidak ada kehadiran PT. Pulomas dalam membuka jalan muara yang menghubungkan mulut laut dengan muara, sehingga aktivitas pelayaran para nelayan terganggu.

Setelah hampir 2 tahun terjadi persidangan yang alot antara pemerintah dan juga PT. Pulomas, akhirnya izin administratif beroperasi dicabut lewat Surat Keterangan (SK) yang

diberikan oleh Gubernur Bangka Belitung pada PT. Pulomas pada 3 Agustus 2021. Pencabutan izin lingkungan kegiatan normalisasi di Muara Aik Kantung dilakukan oleh H. Erzaldi Rosman Djohan selaku Gubernur karena pihak pemerintah daerah kurang puas dengan kinerja yang telah dilakukan oleh PT. Pulomas dalam menjalankan aktivitas pengerukan selama ini. Pemerintah menilai *output* dari hasil pengerukan dan penggalian yang dilakukan PT. Pulomas sama saja dan cenderung tidak memberikan dampak yang signifikan karena setiap harinya aliran gundukan pasir akan selalu luruh dan menyebabkan pendangkalan baik saat air laut pasang maupun surut, sehingga pada akhirnya PT. Pulomas menghentikan aktivitasnya selama kurang lebih 2 tahun dan menyebabkan konflik hukum dan konflik sosial yang merugikan masyarakat. Pasalnya, Majelis Hakim PTUN Bangka Belitung mengatakan bahwa surat keputusan pencabutan izin operasional PT. Pulomas yang dikeluarkan oleh Gubernur melanggar prosedur tanpa menunggu instruksi Menteri Lingkungan Hidup dalam memberikan amar putusan.

Sejalan dengan proses sidang, muncul surat putusan yang menyatakan bahwa PT. Pulomas dapat kembali melakukan aktivitas pengerukan dan pendalaman aliran sungai. Gugatan yang telah diberikan oleh Gubernur Bangka Belitung berhasil dicabut karena prosedur pelaporannya tidak mengikuti aturan dan alasan pelaporan tidak meyakinkan majelis agung dalam mengabulkan gugatan.

Abang Acun, salah satu narasumber dalam penulisan ini mengatakan bahwa saat ini tengah terjadi perebutan izin operasi muara Aik Kantung antara perusahaan-perusahaan internal dan pemerintah. Banyak perusahaan membidik muara Aik Kantung karena potensi bisnis dan ekonomi yang sangat menguntungkan apabila berhasil mendapatkan izin operasional. Dalam wawancara, Acun mengatakan bahwa, “Saat ini terjadi kepentingan sosial yang ditunggangi kepentingan bisnis.” Banyak perusahaan-perusahaan yang menginginkan untuk bisa bekerja di Muara Aik Kantung karena mereka menyadari bahwa di muara terdapat potensi sumber daya alam yang sangat besar.

Di tengah situasi konflik dan ketegangan yang terjadi antara PT. Pulomas dan Pemerintah, masih terdapat kolaborasi dan ‘*kong kali kong*’ kepentingan antara Pemerintah dan PT. Pulomas. Mulai dari Pemerintah daerah yang memberikan izin operasional kembali bagi PT. Pulomas namun pihak pemerintah tidak memberikan bantuan dan pemantauan terhadap progres kinerja yang dilakukan oleh PT. Pulomas. Begitu juga dengan pihak PT. Pulomas, mereka betah menjalankan kegiatannya setiap hari menggunakan mesin ekskavator tanpa merancang strategi pembangunan muara agar tidak menggunakan bantuan alat berat setiap harinya, melainkan melakukan pembangunan yang berkelanjutan sehingga memiliki dampak yang jauh lebih

signifikan bagi masyarakat nelayan. Dari fenomena tersebut, Acun menilai bahwa strategi yang dijalankan oleh pihak Pemerintah dan juga PT. Pulomas adalah jalan tengah agar keduanya mendapatkan simpati rakyat sehingga kebutuhan sosial masyarakat dapat terpenuhi dan masyarakat berpihak dan menilai baik pada PT. Pulomas.

Respon Positif dari Masyarakat

Beroperasinya kembali PT. Pulomas Sentosa dalam melakukan pengerukan dan pendangkalan dengan mendapatkan izin pemerintah cukup menjadi tanda tanya besar setelah pada tahun 2021 izin berusaha PT. Pulomas Sentosa dicabut oleh Gubernur Bangka Belitung. Meskipun begitu, ini tetap menjadi sebuah angin segar bagi kalangan nelayan. Hal ini karena saat kegiatan operasional PT. Pulomas berhenti, pendangkalan terjadi kembali dan membuat kapal-kapal para nelayan sulit melintas sehingga banyak di antara nelayan berhenti sementara dari profesinya karena menimbang biaya yang akan membengkak apabila masyarakat nelayan memilih untuk tetap berlayar dan menyandarkan kapalnya di Pelabuhan Pangkal Balam. Sehingga situasi ini semakin menyulitkan para masyarakat nelayan. Namun, sejak izin kembali dikantongi hingga kini, PT Pulomas terus mengerahkan usaha dan tenaga agar perahu-perahu nelayan dapat berlayar dengan melakukan pengerukan dan pendalaman muara secara berkala dan konsisten setiap harinya.

Dalam proses observasi dan wawancara, ada salah seorang nelayan yang berpendapat bahwa upaya pemerintah mengatasi permasalahan pendangkalan muara Aik Katung melalui pemberian izin kembali kepada PT Pulomas untuk mengeruk dan mengelola sedimen adalah keputusan yang baik. Menurutnya, PT. Pulomas telah bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh, dibuktikan dengan keberadaan alat – alat berat yang digunakan untuk melakukan pengerukan muara yang mengalami pendangkalan. Masyarakat nelayan dan Penaggungjawab Pangkalan Sandar Kapal Patroli Polisi Air Polda Kepulauan Babel Sungailiat menilai bahwa hanya PT. Pulomas yang bersedia melakukan aktivitas pengerukan di saat para masyarakat nelayan meminta pengoptimalan muara agar dapat dilintasi oleh perahu-perahu nelayan.

"Dikarenakan pada saat itu dari sekian banyak perusahaan yang berkegiatan di Muara Air Kantung Sungailiat hanya PT Pulomas Sentosa yang mau untuk melakukan pengerukan tersebut, apalagi saat itu permintaan dari nelayan untuk dapat mengoptimalkan muara agar bisa dilalui nelayan. Sedangkan untuk biaya operasional selama pengerukan tersebut dibiayai sendiri oleh PT Pulomas Sentosa." (Wawancara dengan Acun, Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Acun, diperoleh informasi bahwa seluruh biaya operasional selama pengerukan dibiayai sepenuhnya oleh PT Pulomas Sentosa. Sehingga keberlanjutan operasi PT Pulomas Sentosa untuk mengelola aktivitas pengerukan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemerintah daerah. Hal ini karena, jika hanya mengandalkan pemerintah daerah, keterbatasan anggaran daerah justru semakin menyebabkan permasalahan pendangkalan tidak akan kunjung beralih pada langkah penyelesaian yang tepat.

Agar biaya operasional tidak membengkak, PT Pulomas Sentosa mengambil langkah strategis dengan menjual pasir yang menggunung. Selain itu, masyarakat memandang bahwa PT Pulomas Sentosa turut berkontribusi untuk mendukung kepentingan sosial karena adanya pengalaman nyata. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang di sekitar pangkalan kapal, diketahui bahwa perusahaan pernah mempersilahkan masyarakat sekitar untuk mengambil pasir yang ada di gunung tanpa dipungut biaya. Pasir yang diambil ini, dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk kebutuhan rumah tangga.



Gambar 3. Foto Bersama dengan Para Aparat Polisi Air di Pangkalan Sandar Polairut dan Salah Satu Warga Muara Aik Kantung

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

Respon Negatif dari Masyarakat

PT. Pulomas kembali melakukan aktivitas pengerukan dan pendalaman alur muara setelah izin usahanya kembali diberikan pemerintah daerah. Setiap hari, mesin-mesin konstruksi (ekskavator) selalu dioperasikan untuk mengeruk dan membuka jalan bagi kapal-kapal nelayan agar dapat melintas. PT. Pulomas rela memutar biaya operasional hanya untuk mengulur waktu dan terus beroperasi dengan tujuan untuk menarik simpati rakyat agar kepentingan bisnis yang akan dilakukan oleh PT. Pulomas dapat terlaksana setelah kepentingan sosialnya dalam memikat simpati rakyat dengan melakukan pengerukan dan pendalaman air sungai di muara.

Di sisi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, mereka tidak mengetahui konflik kepentingan apa yang tengah terjadi antara PT. Pulomas dan juga pemerintah, sebab yang masyarakat inginkan hanyalah agar akses masuk antara mulut sungai dan juga pelabuhan dapat dibuka sehingga para nelayan dapat menjalankan aktivitas lautnya dalam mencari hasil tangkapan laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan dengan dilakukannya pengerukan untuk memperdalam aliran sungai, kapal milik nelayan yang memiliki kapasitas 30GT dapat mudah melewati alur penghubung tersebut.

Melalui hasil observasi, peneliti menemukan bahwa respons negatif masyarakat cenderung ditujukan kepada pemerintah karena pemerintah tidak mampu memberikan solusi berkelanjutan dalam memenuhi keinginan masyarakat nelayan. Dahulu, sebelum izin berusaha PT. Pulomas dicabut, nelayan merasa bahwa PT. Pulomas tidak mampu mengatasi ini. Mengutip dari hasil wawancara oleh babelpos.id, para nelayan setempat mengemukakan bahwa aktivitas penggalian muara oleh PT. Pulomas meninggalkan gunung pasir yang mempersempit alur muara dan mempersulit kapal nelayan untuk keluar masuk muara. Dua gunung pasir ini juga sering kali longsor akibatnya muara kembali dangkal dan kapal pun mengalami kerusakan baik tenggelam, tabrakan antar kapal, dan kandas (Babelpos, 2021). Hasil wawancara ini menggambarkan bahwa awalnya, nelayan pun menghendaki atau mendukung keputusan Gubernur Erzaldi untuk mencabut Izin Berusaha PT. Pulomas. Namun, ketika kegiatan operasional PT. Pulomas berhenti, pendangkalan kembali terjadi bahkan semakin parah karena tidak ada perusahaan yang mampu melakukan pengerukan secara berkelanjutan dan nelayan pun menyadari bahwa hanya PT. Pulomas yang bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat tanpa mengetahui bahwa tujuan perusahaan dalam hal ini PT. Pulomas ialah untuk menarik simpati masyarakat untuk memenuhi kepentingan sosial masyarakat nelayan.

Selama PT. Pulomas beroperasi, harapan yang digaungkan oleh masyarakat hanyalah pengerukan terus dilakukan agar mereka memiliki akses jalanan yang baik dalam melintasi muara. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada salah satu nelayan yang menjadi informan dalam penelitian ini mengatakan bahwa mereka sebagai nelayan cukup merasa tidak puas dan muak dengan kinerja PT. Pulomas karena hanya melakukan pengerukan yang dijalankan setiap hari tanpa ada langkah pasti untuk membuka akses jalan secara permanen. Saat melakukan peninjauan lapangan, peneliti mengamati bahwa di tengah aktivitas pengerukan terdapat nelayan yang memaksakan diri untuk melaut dan ketika kapal berada di area pengerukan, selama beberapa menit kapal nelayan terombang-ambing dengan kencang. Kondisi inilah yang

menyebabkan banyaknya nelayan mengeluhkan kerusakan badan kapal. Selain itu, beberapa nelayan juga terlihat beberapa kali mendatangi dan memantau aktivitas pengerukan dengan tujuan memastikan bahwa aktivitas pengerukan telah selesai sehingga mereka bisa langsung melaut.

Pendangkalan Muara Aik Katung yang terus memburuk menyebabkan sebagian masyarakat nelayan mulai beralih mata pencahariannya dan tidak terlalu mengharapkan penghasilan dari tangkapan laut. Sehingga, orientasi mata pencaharian masyarakat menjadi berubah. Terutama ketika musim utara, masyarakat nelayan rela beralih profesi dan mengasingkan perahu-perahu milik mereka yang sebagian rusak karena terjangan arus laut yang cukup deras. Kondisi ini menyebabkan hadirnya pemandangan bangkai-bangkai kapal yang memenuhi pelabuhan. Pertimbangan ini dilakukan oleh masyarakat karena mereka memandang bahwa solusi pengerukan dan pendalaman muara dengan menggunakan ekskavator merupakan solusi jangka pendek.

Kemudian, permasalahan kondisi muara Aik Kantung juga dapat menimbulkan situasi memanas dan gejolak konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Beberapa nelayan yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa mereka merasa bahwa pemerintah daerah tidak kunjung memberikan solusi yang tepat baik jangka pendek maupun panjang untuk mengatasi permasalahan pendangkalan muara ini ditambah dengan adanya oknum-oknum yang menghasut gejolak konflik. Beberapa nelayan mengungkapkan bahwa mereka sudah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah karena merasa pemerintah daerah kurang memperhatikan dan tidak cukup serius dalam mengatasi masalah ini. Padahal masalah ini sangat berkaitan erat dengan kepentingan dan kesejahteraan sosial masyarakat nelayan. Hilangnya rasa percaya terhadap pemerintah menimbulkan ketegangan antara nelayan dengan pemerintah. Selain itu, dikhawatirkan, ketidaktahuan masyarakat terhadap konflik sunyi yang terjadi berimplikasi pada kehidupan masyarakat nelayan yang dikorbankan karena pihak pemenang 'kuasa' atas muara akan menjalankan kepentingan bisnisnya dengan memanfaatkan potensi yang ada di Muara Aik Kantung.

Menurut analisis sosiologis kami, apabila pemerintah ataupun perusahaan semata-mata berorientasi mendapatkan keuntungan bisnis dari proses pengerukan tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat, maka tingkat kekecewaan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan perusahaan akan terdegradasi. Diketahui, PT. Pulomas dan Pemerintah sama-sama melakukan kerja sama untuk memanfaatkan muara sebagai kepentingan bisnis mereka. Implikasinya akan kembali pada masyarakat, karena aktivitas yang dilakukan ke depannya akan

semakin masif berorientasi pada profit sehingga tidak menutup kemungkinan dampak lingkungan dan ekonomi akan merugikan masyarakat di sekitar muara Aik Kantung.



Gambar 4. Bangkai-bangkai kapal yang terpakir di Sisi Pelabuhan

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

Analisis Fenomena Sosial Menggunakan Tipe Ideal Max Weber

Pencabutan izin berusaha PT. Pulomas oleh Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi pada 2019 hingga 2021, dilakukan dengan dalih ketidakpuasan pemerintah terhadap PT. Pulomas yang hanya mengerahkan ekskavator untuk menggali sedimen di muara. Namun, pencabutan melalui SK oleh Gubernur dilakukan tidak mengikuti prosedur formal yang ada karena dari proses pelaporan hingga keputusan diambil tanpa menunggu arahan dari Menteri Lingkungan Hidup. Bahkan alasan yang diberikan tidak transparansi sehingga diragukan oleh majelis agung dan memicu dugaan bahwa pencabutan ini dilakukan semata-mata ingin menggantikan PT. Pulomas dengan perusahaan lain untuk memegang kuasa operasional di muara Aik Katung Jelitik yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meluncurkan tujuan kepentingan bisnisnya (Fermana, 2024).

Ketika PT. Pulomas sebagai satu-satunya perusahaan yang mampu melakukan pengerukan menggunakan seluruh dana perusahaan mereka dan tidak meminta imbalan dari pemerintah, kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan yang bergantung dengan muara Aik Katung menjadi kacau. Masyarakat hanya ingin alur muara tidak mengalami pendangkalan dan nelayan dapat dengan mudah pergi melaut tanpa takut ancaman kerusakan kapal ataupun biaya operasional yang membengkak karena pendangkalan akibat sedimen. Dalam permasalahan tersebut, pemerintah tidak kunjung melakukan tindakan guna mendukung upaya dalam mengatasi permasalahan di muara, hal ini membuat masyarakat merasa bahwa kepentingan sosial nelayan dimanfaatkan sebagai tameng kepentingan bisnis sehingga masyarakat berbalik memberikan respons negatif ke pemerintah daerah.

Akhirnya masyarakat mendukung PT. Pulomas untuk beroperasi bahkan hingga kini masyarakat hanya mempercayai PT. Pulomas karena telah mampu memperhatikan kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat nelayan meskipun upaya yang dilakukan hanyalah sebatas pengerukan menggunakan ekskavator. Upaya-upaya baik yang telah dikonstruksi oleh PT Pulomas membawa kebermanfaatan yang sangat jelas pada masyarakat sekitar. Bahkan, kadang kala PT. Pulomas mengarahkan masyarakat untuk mengambil pasir-pasir yang ada sebagai upaya mengurangi volume gunung pasir hasil pengerukan sedimentasi. Keputusan pencabutan izin berusaha PT. Pulomas oleh Gubernur yang melanggar aturan dan alasan yang tidak transparan menunjukkan bahwa pemerintah sebagai bentuk birokrasi yang rasional melanggar prinsip standarisasi dan formalisasi.

Pejabat-pejabat sebagai bagian dari birokrasi yang tidak memberikan solusi alternatif lain dan hanya mengharapkan PT. Pulomas menunjukkan bahwa kurangnya pembagian kerja dan spesialisasi dalam birokrasi. Hal ini karena tidak adanya pengganti PT. Pulomas yang lebih efisien dan kompeten dari pemerintah. Kemudian, izin yang dicabut tanpa menunggu pertimbangan Menteri Lingkungan Hidup yang berkedudukan lebih tinggi menunjukkan bahwa keputusan dan tindakan Gubernur Erzaldi melanggar prinsip hierarki otoritas. Jika pejabat pemerintahan dipilih berdasarkan kualifikasi teknis sehingga memiliki kemampuan memadai harusnya mampu menggunakan pengetahuannya untuk mencari solusi berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini. Namun, ketidakmampuan ini bahkan memunculkan dugaan mencabut izin demi kepentingan bisnis sangat melanggar prinsip profesionalisasi. Terakhir, pencabutan izin administratif beroperasi PT. Pulomas memang di dokumenasikan tertulis melalui Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan Gubernur pada 3 Agustus 2021. Namun, dokumen tidak disertai dampak dan alternatif baru baik untuk sementara ataupun jangka panjang. SK yang dikeluarkan juga dipandang cacat hukum karena melanggar perundang-undangan dan gubernur tunduk pada aturan hukum yang ada.

Dalam tipe ideal yang dikemukakan Max Weber, terdapat lima prinsip. Konsep ini akan membantu mengevaluasi sejauh mana efektivitas atau penyimpangan birokrasi terhadap prinsip tipe ideal yang mengakibatkan kepentingan sosial masyarakat termarginalkan sehingga memperburuk kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah daerah Bangka Belitung dalam proses-proses, tindakan, dan keputusan pencabutan izin pengerukan PT. Pulomas hingga sekarang PT. Pulomas beroperasi kembali, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai organisasi yang harus mengatasi masalah dan menyejahterakan rakyatnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal dan menyimpang dari

tipe ideal Max Weber yang di mana seharusnya birokrasi yang rasional harusnya memberikan solusi dan upaya berkelanjutan yang terstruktur tanpa bergantung penuh terhadap PT. Pulomas untuk mengatasi permasalahan pendangkalan di alur muara Aik Katung Jelitik.

Hubungannya dengan respons masyarakat adalah jika pemerintah daerah sebagai birokrasi berjalan dan menerapkan prinsip tipe ideal dengan baik maka masyarakat akan puas dan mendukung penuh keputusan pemerintah. Namun, pada kenyataannya, pemerintah yang tampak seperti lepas tangan dalam merespon dan mencari upaya rasional dan efektif, hal ini menyebabkan pemerintah dipandang memarginalkan kepentingan sosial serta kebutuhan nelayan yang dikesampingkan sehingga nelayan tidak puas dan mempertanyakan kinerja serta keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Walaupun PT. Pulomas melakukan pengerukan dengan teknologi dan peralatan yang terbatas sehingga dalam proses paya pengerjaannya terkadang memakan waktu lama, Masyarakat justru lebih merasa puas dengan keberadaan PT. Pulomas yang hingga kini membantu dan memperhatikan kesejahteraan sosial nelayan, terlepas adanya kemungkinan kepentingan bisnis dibaliknya. Pada akhirnya, segala bentuk dinamika yang telah terjadi membuat pandangan masyarakat terkonstruksi kembali, dari awalnya mendukung pemerintah mencabut izin PT Pulomas menjadi mendukung kegiatan pengerukan oleh PT. Pulomas dan terbangunnya ketegangan dan sikap skeptisme masyarakat terhadap pemerintah karena kepercayaan masyarakat kepada pemerintah telah hilang, masyarakat menilai bahwa pemerintah telah mengesampingkan suara atas keinginan dan kebutuhan masyarakat dan orientasi pemerintah saat ini lebih mengedepankan kepentingan politis dan ekonomi (Rais, 2022).

PENUTUP

Permasalahan pendangkalan muara Aik Kantung sangat kompleks. Berawal dari penambangan timah yang masif di masa lalu bahkan masih berlanjut hingga saat ini di daerah hulu yang membuat sedimen-sedimen seperti lumpur dan pasir terbawa arus. Puncaknya adalah saat musim utara saat arus air lebih kuat sehingga menyebabkan permasalahan serius dan sulit diselesaikan hingga saat ini, yaitu pendangkalan muara Aik Kantung. Pendangkalan ini membuat nelayan tidak dapat pergi melaut. Permasalahan ini menimbulkan respons yang berbeda-beda di kalangan masyarakat nelayan.

Respons positif ditunjukkan kepada PT. Pulomas. Di mana nelayan dan sektor sekitar muara menilai perusahaan telah berdedikasi penuh berupaya membantu mengatasi masalah nelayan dengan melakukan pengerukan muara menggunakan ekskavator secara konsisten dan

menanggung seluruh biaya operasional sendiri, terlepas kepentingan bisnis di baliknya. Sedangkan respons negatif cenderung ditunjukkan kepada pemerintah daerah. Pada awalnya, beberapa nelayan memang mendukung pencabutan izin berusaha PT. Pulomas karena dinilai merugikan karena masalah tidak terselesaikan dan menyebabkan kerusakan kapal nelayan. Namun, setelah PT. Pulomas berhenti beroperasi, pendangkalan semakin parah karena pemerintah daerah gagal sebagai birokrasi yang seharusnya memberikan solusi berkelanjutan dengan keahlian dan pengetahuan para pejabatnya, membuat masyarakat berbalik memberikan respons negatif ke pemerintah daerah. PT. Pulomas dinilai mampu memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan nelayan walaupun aktivitas pengerukan dilakukan dengan sederhana dan berulang di setiap harinya.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan perusahaan mengambil langkah yang tepat sebagai solusi jangka panjang untuk permasalahan ini. Harapan masyarakat yang tinggal di sekitar Muara Aik Kantung Jelitik adalah lancarnya akses alur keluar dan masuk muara tanpa adanya pendangkalan sehingga alur keluar masuk muara senantiasa terbuka, dengan itu para nelayan dapat bisa mencari nafkah dari hasil pelayaran dengan menangkap potensi hewan-hewan di lautan. Kepentingan bisnis yang dilakukan antara pemerintah dan perusahaan perlu dipertimbangkan kembali dengan mengedepankan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar, terutama masyarakat nelayan yang sangat terdampak oleh gunung sedimen yang menutupi jalur untuk keluar masuk muara.

DAFTAR PUSTAKA

- Babelpos. (2021). Nelayan Bela Gubernur, Dukung Pencabutan Izin Pulomas. *Babelpos.Id*.
- Fermana, R. (n.d.). *PT Pulomas Sentosa Kantongi izin dan diperintahkan Pj Gubernur Babel Lakukan Pengerukan Alur, Justru PT Naga Laut Sumatera Ngotot Kirimkan Kapal Osman 7*.
- Kadir, A. (2015). Prinsip-prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 1(1), 40–54.
- Peteet, D., & Nichols, J. (n.d.). *Sediment Transport Modeling at Jelitik Estuary, Sungailiat - Bangka Regency for the Design of Sediment Control Structures Sediment Transport Modeling at Jelitik Estuary, Sungailiat - Bangka Regency for the Design of Sediment Control Structures*. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1625/1/012042>
- Prihatsanti, U., & Hendriani, W. (2018). *Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah*

- dalam Psikologi*. 26(2), 126–136. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.38895>
- Rais, A. (2022). *Beberapa Tokoh Nelayan mendukung dan meminta PT Pulomas Sentosa untuk tetap melakukan Normalisasi Alur Muara Air Kantung Kabupaten Bangka*. Poros Indonesia.
- SIKADO. (n.d.). *Data Rujukan Nasional Kelautan Wilayah Kelautan Indonesia*.
- Sugiono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke, 332.
- Suparyanto dan Rosad. (2020). Teknik analisis data. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.